

LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

**JUDUL : PENGARUH PENERAPAN KEBIJAKAN DAERAH KULON
PROGO TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER TERHADAP UPAYA
PEMBENTUKAN KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN PPKN
SMP**

NAMA : KRISTI NANDA INSANI

NIM : 16401241024

PRODI : PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN-S1



Reviewer,



Suripno, S.H., M.Pd
NIP. 19560615 198601 1 001

Yogyakarta, 23 Juni 2020

Dosen Pembimbing,



Dr. Samsuri, M.Ag
NIP. 19720619 200212 1 001

PENGARUH PENERAPAN KEBIJAKAN DAERAH KULON PROGO TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER TERHADAP UPAYA PEMBENTUKAN KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN PPKn SMP

THE EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF KULON PROGO REGIONAL POLICY ON CHARACTER EDUCATION ON THE EFFORTS OF CHARACTER BUILDING IN LEARNING OF PPKn SMP

Kristi Nanda Insani dan Dr. Samsuri, M.Ag.

kristi.nanda2016@student.uny.ac.id

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi ada tidaknya pengaruh penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter terhadap upaya pembentukan karakter dalam pembelajaran PPKn SMP. Penelitian ini termasuk jenis penelitian survei deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil uji prasyarat analisis menunjukkan variabel penerapan Perda Pendidikan Karakter dan upaya pembentukan karakter dalam pembelajaran PPKn SMP diperoleh distribusi data seluruhnya terdistribusi normal yaitu sebesar 0,200, kemudian memiliki hubungan yang linier dengan nilai p sebesar 0,053. Adapun hasil uji hipotesis penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara variabel penerapan Perda Pendidikan Karakter dengan upaya pembentukan karakter dalam pembelajaran PPKn SMP dengan koefisien korelasi (r) sebesar 0,501, dan terdapat pengaruh penerapan Perda Pendidikan Karakter terhadap upaya pembentukan karakter dalam pembelajaran PPKn SMP di Kabupaten Kulon Progo sebesar 25,1 %.

Kata kunci: *Perda Pendidikan Karakter, PPKn*

Abstrak

This study aims to determine and identify whether there is an influence on the application of the Regional Regulation of Kulon Progo District Number 18 of 2015 concerning Management of Character Education to the efforts of character building in the learning of PPKn SMP. This research is a descriptive survey research with quantitative approach. The results of the analysis prerequisite test showed that the variable of the implementation of the Regional Regulation on Character Education and the efforts of character building in learning PPKn SMP obtained that all data distributions were normally distributed at 0.200, then had a linear relationship with a p-value of 0.053. The results of the research hypothesis test show that there is a positive relationship between the variables of the implementation Regional Regulation on Character Education with the efforts of character formation in learning PPKn SMP with a correlation coefficient (r) of 0.501, and there is an effect on the implementation Regional Regulation on Character Education to the efforts of character building in the learning of PPKn SMP in the Regency Kulon Progo is 25.1%.

Keywords: *Regional Regulation on Character Education, PPKn*

PENDAHULUAN

Salah satu kebijakan reformasi di bidang pendidikan di Indonesia adalah desentralisasi pendidikan. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi pendidikan menginginkan bahwa pendidikan tidak boleh diseragamkan tetapi berorientasi pada keanekaragaman lingkungan dan budaya. Seperti

pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (2016:36) bahwa nilai-nilai budaya lokal, karakteristik daerah dan potensi-potensi wilayah menjadi referensi berharga untuk diikutsertakan sebagai bagian utama bagi pendidikan yang didesentralisasi dan diotonomisasi, terutama dalam hal materi atau isi pembelajaran.

Dalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah sebagai pemilik otoritas tertinggi di daerah memiliki kewenangan dalam hal pengaturan, pengurusan, pembinaan, serta pengawasan. Karenanya komitmen dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan adalah suatu hal yang sangat diperlukan. Pemerintah daerah diharapkan menciptakan strategi dan inovasi dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan di daerahnya masing-masing. Pemerintah Daerah mengetahui dan mengerti apa yang seharusnya dapat dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya (Winarno, 2018:10). Misalnya suatu daerah melakukan kebijakan tentang kurikulum muatan lokal termasuk di dalamnya adalah kebijakan daerah mengenai pendidikan karakter.

Pemerintah merupakan komponen yang sangat penting dalam kegiatan pembentukan karakter bangsa. Para aparatur negara sebagai penyelenggara pemerintahan merupakan pengambil dan pelaksana kebijakan yang ikut menentukan berhasilnya pembangunan karakter bangsa, baik pada tataran informal, formal maupun nonformal. Sardiman (2013:5) mengemukakan bahwa pemerintah harus secara intens melibatkan diri dalam pendidikan karakter ini dengan berbagai regulasi, menetapkan berbagai peraturan daerah yang dapat mendukung pelaksanaan pembentukan karakter bangsa. Bagi pemerintah pusat perlu menopang dengan berbagai kebijakan umum yang memperkuat pengembangan program pendidikan karakter. Melalui Kementerian Pendidikan Nasional, kemudian mengeluarkan berbagai pedoman melalui para ahli untuk pelaksanaan pendidikan

karakter bangsa di berbagai daerah. Sementara itu dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan berbagai peraturan daerah (Perda) untuk mengatur pelaksanaan pendidikan karakter di daerah.

Melihat realita urgensi pendidikan karakter pada saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo telah membuat Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter. Perda tersebut merupakan Perda pertama di Indonesia yang mengatur mengenai pendidikan karakter. Perda ini diberlakukan efektif pada awal tahun 2018. Perda tersebut menekankan tiga aspek utama dalam pendidikan karakter yakni kegiatan pengamalan nilai-nilai Pancasila, kegiatan keagamaan, dan kegiatan budaya kemandirian dengan berbasis lokal. Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter menyebutkan pengembangan nilai-nilai dalam pendidikan karakter melalui budaya sekolah mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh warga sekolah. Pengembangan nilai-nilai tersebut meliputi kepemimpinan, keramahan, toleransi, kerja keras, disiplin, kepedulian sosial, kepedulian lingkungan, rasa kebangsaan, tanggung jawab, rasa memiliki, gotong royong, dan etika pergaulan. Diharapkan dengan adanya Perda Pendidikan Karakter di Kulon Progo tercipta pelaksanaan pendidikan karakter yang efektif, terkonsep, serta diawasi langsung oleh Pemerintah Daerah Kulon Progo.

Melalui pendidikan karakter diharapkan mampu mencapai tujuan nasional yang tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV, khususnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan karakter pada dasarnya merupakan ujung tombak membangun kualitas peserta didik, maka pemerintah Indonesia memberi tuntutan kepada seluruh guru untuk mengimplementasikan pendidikan karakter di setiap mata pelajaran maupun mata kuliah.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan nasional memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih lanjut, dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Di sisi lain, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran dan mata kuliah yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam membangun karakter peserta didik, karena Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan pendidikan moral dan wajib diberikan di setiap jenjang pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Winarno (2018:20) mengemukakan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran dan posisi yang penting dalam membangun karakter bangsa, sehingga Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki tanggung jawab yang besar dalam mencapai tujuan nasional khususnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada dasarnya peran untuk membangun karakter bangsa tidak hanya tugas pendidikan kewarganegaraan saja, namun juga tugas mata pelajaran atau mata kuliah yang lain, tetapi pendidikan kewarganegaraan memiliki beban moral yang paling besar karena pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan moral bangsa.

Cholisin (2011:3) mengemukakan Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun warga negara yang baik mengembangkan tiga kompetensi yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dan karakter kewarganegaraan (*civic disposition*). Sejalan

dengan pendapat Samsuri (2011:278) bahwa paradigma kajian Pendidikan Kewarganegaraan menekankan kepada penguasaan kompetensi kewarganegaraan bagi para siswa meliputi aspek pengetahuan (materi kajian aspek keterampilan/kecakapan dan aspek perilaku. Syarat utama untuk menjadi warga negara yang baik harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan karakter yang berdasarkan Pancasila. Apabila ketiga kompetensi dimiliki oleh setiap warga negara, maka secara langsung maupun tidak langsung warga tersebut adalah individu yang berkompeten, berkomitmen, dan memiliki kepercayaan diri.

Dalam pengembangan karakter peserta didik di sekolah, guru memiliki posisi yang strategis sebagai pelaku utama. Guru merupakan sosok yang bisa ditiru atau menjadi idola bagi peserta didik. Guru bisa menjadi sumber inspirasi dan motivasi peserta didiknya. Sikap dan perilaku seorang guru sangat membekas dalam diri peserta didik, sehingga ucapan, karakter dan kepribadian guru menjadi cermin peserta didik. Dengan demikian guru memiliki tanggung jawab besar dalam menghasilkan generasi yang berkarakter, berbudaya, dan bermoral. Tugas-tugas manusiawi itu merupakan transformasi, identifikasi, dan pengertian tentang diri sendiri, yang harus dilaksanakan secara bersama-sama dalam kesatuan yang organis, harmonis, dan dinamis (Arianto, 2013:4).

Guru PPKn merupakan salah satu guru yang memiliki tugas dan kewajiban menanamkan etika norma dan perilaku yang berlaku di masyarakat, termasuk didalamnya penanaman pendidikan karakter bagi anak. Jadi tentunya guru PPKn dalam membentuk karakter peserta didik memiliki peranan yang sangat penting karena PPKn merupakan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk warganegara yang baik dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Hardiyana (2014:63) bahwa pengaruh guru PPKn SMK se

Kabupaten Pati terhadap pembentukan karakter siswa berada pada kriteria sangat tinggi, hal ini didukung oleh skor sebesar 70,80% dalam arti penanaman karakter pada anak bisa dimiliki dengan sangat baik salah satunya berkat proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru PPKn. Akan tetapi terdapat juga kendala yang dialami Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam pelaksanaan pendidikan karakter yaitu masih mengedepankan aspek kognitif, sehingga tujuan untuk menciptakan peserta didik yang kritis dan bertanggung jawab masih belum terealisasi.

Pernyataan ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Dianti (2014:68) yang mengatakan bahwa pengamatan di lapangan banyak guru yang belum maksimal mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran PPKn. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh guru dalam mengintegrasikan konsep pendidikan karakter banyak dirasakan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Pada tahap perencanaan terkadang guru diminta untuk melengkapi hal-hal yang bersifat administratif sehingga penyusunannya tidak terlalu baik.

Selanjutnya pada tahap pelaksanaan kendalanya adalah waktu. Terkadang untuk melakukan bentuk pembelajaran yang ideal dalam mendukung pengembangan karakter peserta didik dibutuhkan waktu yang lebih banyak. Dalam penelitian tersebut juga dikemukakan bentuk evaluasi atau penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran PPKn belum begitu baik karena ketika pembelajaran di kelas, peneliti melihat bahwa guru tidak menggunakan teknik penilaian yang beragam. Guru hanya melakukan penilaian berupa penilaian terhadap tugas siswa dalam bentuk tertulis, selanjutnya guru juga melakukan penilaian dengan memberikan pertanyaan langsung kepada siswa di akhir pelajaran yang hanya sebatas pada pengukuran kognitif saja. Selanjutnya guru sudah melakukan penilaian terhadap sikap siswa selama proses pembelajaran, namun belum dilakukan

secara terus-menerus. Hal tersebut menunjukkan bahwa guru belum maksimal dalam melakukan evaluasi pembelajaran berkarakter. Hambatan lain yang dikemukakan dalam penelitian tersebut adalah PPKn dianggap sebagai mata pelajaran yang membosankan karena hanya memuat teori dan hafalan, sehingga proses integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran PPKn tidak maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kehadiran Peraturan Daerah Kulon Progo No 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter akan mempengaruhi kinerja guru PPKn dalam mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran, karena guru PPKn merupakan pihak yang secara langsung melaksanakan Perda tersebut di lapangan. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dalam bidang pendidikan seperti yang dikemukakan di atas, bahwa nilai-nilai budaya lokal, karakteristik daerah dan potensi-potensi wilayah menjadi referensi berharga untuk diikutsertakan sebagai bagian utama bagi pendidikan yang didesentralisasi termasuk kebijakan pendidikan karakter di daerah. Pemerintah Daerah Kulon Progo telah membuat kebijakan yang berupa Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter.

Dengan adanya Perda Pendidikan Karakter tersebut penulis ingin meneliti pengaruh penerapan Perda Pendidikan Karakter tersebut terhadap upaya pembentukan karakter dalam pelajaran PPKn khususnya SMP di Kulon Progo, mengingat PPKn merupakan mata pelajaran yang mengintegrasikan pendidikan karakter di dalamnya. Penelitian yang berjudul "Pengaruh Penerapan Kebijakan Daerah Kulon Progo tentang Pendidikan Karakter terhadap Upaya Pembentukan Karakter dalam Pembelajaran PPKn SMP" dilakukan untuk mengetahui dengan hadirnya kebijakan Perda Pendidikan Karakter tersebut apakah posisi PPKn sebagai pendidikan karakter semakin menguat atau justru

semakin melemah, karena sampai saat ini PPKn masih dianggap mata pelajaran yang kurang penting, serta bagaimana peran guru PPKn khususnya guru PPKn SMP di Kulon Progo dalam melaksanakan Perda Pendidikan Karakter tersebut karena guru PPKn merupakan pihak utama yang secara langsung melaksanakan Perda tersebut di lapangan. Karena belum ada penelitian tentang masalah ini sebelumnya, sehingga hal ini penting untuk diteliti guna melahirkan informasi-informasi penting perihal pengaruh kehadiran Perda Pendidikan Karakter terhadap upaya pembentukan karakter dalam pembelajaran PPKn khususnya pada tingkat SMP.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian ini bersifat kuantitatif dengan jenis penelitian yang digunakan ialah survei deskriptif.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat yang peneliti gunakan sebagai tempat penelitian adalah di SMP se- Kabupaten Kulon Progo. Hal ini dikarenakan populasi dan sampel pada penelitian ini adalah guru PPKn SMP se-Kabupaten Kulon Progo sebagai pihak yang secara langsung melaksanakan Perda Pendidikan Karakter di sekolah. Penelitian dengan judul "Pengaruh Penerapan Kebijakan Daerah Kulon Progo tentang Pendidikan Karakter terhadap Upaya Pembentukan Karakter dalam Pembelajaran PPKn SMP" dilaksanakan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan tepatnya pada bulan Februari- April 2020.

Populasi dan Sampel Penelitian

. Populasi dalam penelitian ini adalah guru PPKn SMP se- Kabupaten Kulon Progo baik negeri maupun swasta yang berjumlah 52 orang. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel bertujuan (*purposive sampling*). Sampel bertujuan adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017:68). Kriteria yang digunakan dalam

penelitian ini adalah guru PPKn yang sudah memiliki pengalaman bekerja yang cukup memadai agar data yang diperoleh benar-benar kredibel. Oleh karena itu sampel dalam penelitian ini adalah guru PPKn yang aktif dalam MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) PPKn SMP di Kabupaten Kulon Progo yang berjumlah 40 orang.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan angket. Arikunto (2013:151) mengemukakan angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal lain yang ia ketahui. Skor yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *skala likert*. Skala penilaian diukur menggunakan metode *skala likert* yang terdiri dari dua klasifikasi pertanyaan positif dan negatif dengan alternatif empat jawaban. Skala likert dengan interval 1-4, dimana skor 1 menunjukkan kriteria sangat tidak baik, 2 tidak baik, 3 baik, dan 4 sangat baik.

Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Uji instrumen perlu dilakukan sebelum melakukan penelitian. Hal ini dimaksudkan agar instrumen yang akan digunakan dalam mengukur variabel memiliki validitas dan reliabilitas sesuai ketentuan. Instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut telah melalui uji reliabilitas.

Purwanto (2007:123) menjelaskan bahwa validitas adalah kemampuan validitas berhubungan dengan kemampuan untuk mengukur secara tepat sesuatu yang ingin diukur. Jenis validitas pada penelitian ini adalah validitas internal. Validitas internal terdiri dari validitas isi dan validitas konstruk. Validitas internal adalah pengujian validitas yang dilakukan dengan menelaah butir instrumen dengan teori dan meminta pertimbangan ahli (*expert judgement*).

Analisis realibilitas instrumen menggunakan rumus *Alpha Cronbarch* karena jawaban dalam angket ini tidak terdapat jawaban yang salah. Koefisiensi reliabilitas *Alpha*

Cronbach dalam penelitian, ini dihitung dengan bantuan program *SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for Windows 22.0*. Dasar pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas adalah $\alpha > r$ tabel = konsisten sedangkan $\alpha < r$ tabel = tidak konsisten.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data yaitu: mengelompokkan data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2017:147). Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan presentase. Sesuai dengan hipotesis dan tujuan penelitian ini yaitu mencari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, maka data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan uji syarat yaitu berupa uji normalitas dan uji linieritas yang kemudian akan dianalisis untuk menguji hipotesis.

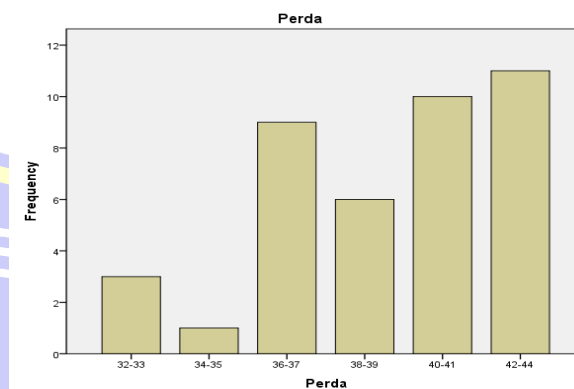
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data penerapan Perda Pendidikan Karakter yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari angket yang sudah peneliti sebar ke seluruh guru anggota MGMP PPKn SMP se-Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah butir pertanyaan 11 item. Skor yang digunakan adalah 1 sampai 4, sehingga kemungkinan skor maksimal yang diperoleh adalah 44 dan skor minimal adalah 11. Pembahasan berikut ini akan disajikan hasil penelitian berdasarkan data yang telah diperoleh dalam penelitian.

Data yang diperoleh dari lapangan untuk penerapan Perda Pendidikan Karakter skor terendah yang didapat adalah 32 dan skor tertinggi adalah 44. Adapun distribusi frekuensi variabel penerapan Perda Pendidikan Karakter dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Skor Penerapan Perda Pendidikan Karakter.

Interval	F	fka	f%
32-33	3	3	7,5%
34-35	1	4	2,5%
36-37	9	13	22,5%
38-39	6	19	15%
40-41	10	29	25%
42-44	11	40	27,5%
Jumlah	40		100%



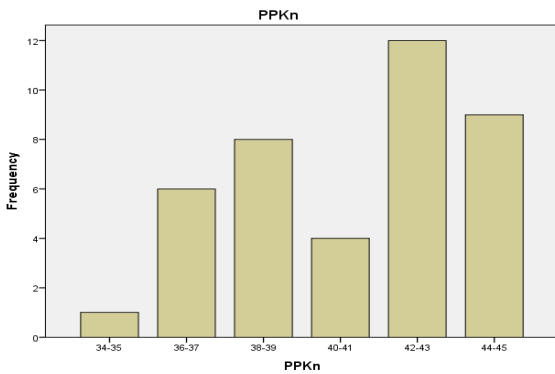
Gambar 1. Histogram Distribusi Frekuensi Skor Penerapan Perda Pendidikan Karakter

Data upaya pembentukan karakter dalam pembelajaran PPKn SMP yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari angket yang sudah peneliti sebar ke seluruh guru anggota MGMP PPKn SMP se-Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah butir pertanyaan 11 item. Skor yang digunakan adalah 1 sampai 4, sehingga kemungkinan skor maksimal yang diperoleh adalah 44 dan skor minimal adalah 11. Pembahasan berikut ini akan disajikan hasil penelitian berdasarkan data yang telah diperoleh dalam penelitian.

Data yang diperoleh dari lapangan untuk upaya pembentukan karakter dalam pembelajaran PPKn SMP, skor terendah yang didapat adalah 35 dan skor tertinggi adalah 44. Adapun distribusi frekuensi variabel upaya pembentukan karakter dalam pembelajaran PPKn SMP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Skor Upaya Pembentukan Karakter dalam pembelajaran PPKn SMP

Interval	F	fka	f%
34-35	1	1	2,5%
36-37	6	7	15%
38-39	8	15	20%
40-41	4	19	10%
42-43	12	31	30%
44-45	9	40	22,5%
Jumlah	40		100%



Gambar 3. Histogram Distribusi Frekuensi Skor Upaya Pembentukan Karakter dalam Pembelajaran PPKn SMP

Kategorisasi data variabel penerapan Perda Pendidikan Karakter dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Kategorisasi Penerapan Perda Pendidikan Karakter.

Interval	F	Presentase	Kategori
$X \geq 33$	39	97,5 %	Tinggi
$22 \leq X < 33$	1	2,5%	Sedang
$X < 22$	0	0%	Rendah
Jumlah	40	100%	-

X = skor penerapan Perda Pendidikan Karakter

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa data penerapan Perda Pendidikan Karakter 97,5% berada di kategori tinggi, 2,5% berada di kategori sedang, dan 0% berada di kategori rendah.

Kategorisasi data variabel penerapan Perda Pendidikan Karakter dapat dilihat pada tabel 11, dibawah ini:

Tabel.4 Kategorisasi Upaya Pembentukan Karakter dalam Pembelajaran PPKn SMP

Interval	F	Presentase	Kategori
$X \geq 33$	40	100%	Tinggi
$22 \leq X < 33$	0	0%	Sedang
$X < 22$	0	0%	Rendah
Jumlah	40	100%	-

X = skor upaya pembentukan karakter dalam pembelajaran PPKn SMP

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa data upaya pembentukan karakter dalam pembelajaran PPKn SMP seluruhnya berada dalam kategori tinggi yaitu 100% .

Dari hasil uji normalitas residual dengan Kolmogrov Smirnov diperoleh distribusi data seluruhnya terdistribusi normal, karena nilai sig untuk Pengaruh Perda Pendidikan Karakter terhadap upaya pembentukan karakter dalam pembelajaran PPKn SMP = 0,200 > 0,05. Tabel uji normalitas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.51479903
Most Extreme Differences	Absolute	.098
	Positive	.098
	Negative	-.090
Test Statistic		.098
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Hasil perhitungan uji linieritas variabel Perda Pendidikan Karakter dengan upaya pembentukan karakter dalam PPKn yang dalam hal ini subyek penelitiannya adalah guru PPKn SMP se- Kabupaten Kulon Progo yang tergabung dalam MGMP menunjukkan bahwa nilai p pada kolom Sig. sebesar 0,053(p > 0,05) dan nilai F_{hitung} sebesar 2.158. Karena 0.053 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara penerapan Perda Pendidikan Karakter dengan pembentukan karakter dalam PPKn memiliki hubungan yang linier, artinya apabila ada kenaikan pada variabel penerapan Perda Pendidikan Karakter, maka akan terjadi kenaikan juga pada pembentukan karakter dalam pembelajaran PPKn.

Hasil perhitungan uji linieritas variabel Perda Pendidikan Karakter dengan variabel upaya

pembentukan karakter dalam PPKn SMP dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6. Hasil Uji Linieritas

Hubungan Fungsional	Statistik		Kesimpulan
	F_{hitung}	p	
Perda Pendidikan Karakter (X) dengan pembentukan karakter dalam PPKn SMP (Y)	2.158	0.053	Linier

Untuk hasil pengujian hipotesis dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis

Variabel yang diuji	r_{hitung}	r_{tabel}	r^2	Kondisi	Ket
Penerapan Perda Pendidikan Karakter dengan upaya pembentukan karakter dalam pembelajaran PPKn SMP	0,501	0,312	0,251	$r_{hitung} > r_{tabel}$	H_0 ditolak

Dari hasil analisis korelasi, diketahui bahwa koefisien korelasi antara variabel penerapan Perda Pendidikan Karakter dengan upaya pembentukan karakter dalam pembelajaran PPKn SMP r sebesar 0,501, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara penerapan Perda Pendidikan Karakter dengan upaya pembentukan karakter dalam pembelajaran PPKn SMP di Kabupaten Kulon Progo. Sementara itu, nilai koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,251, sehingga dapat dikatakan penerapan Perda Pendidikan Karakter mempengaruhi upaya pembentukan karakter dalam pembelajaran PPKn SMP sebesar 25,1%. Hasil analisis korelasi mendukung hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu terdapat pengaruh antara penerapan Perda Pendidikan Karakter terhadap upaya pembentukan karakter dalam pembelajaran PPKn SMP di Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, dari hasil analisis

korelasi tersebut dapat dikatakan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima.

Penerapan Perda Pendidikan Karakter mempengaruhi upaya pembentukan karakter dalam pembelajaran PPKn SMP sebesar 25,1%, sedangkan 74,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Secara umum Perda Pendidikan Karakter berlaku untuk seluruh mata pelajaran, tidak hanya untuk mata pelajaran PPKn saja. Alasan penelitian ini yang diteliti adalah tingkat pengaruh penerapan Perda Pendidikan Karakter terhadap upaya pembentukan karakter dalam pembelajaran PPKn karena mata pelajaran PPKn sejatinya sudah memuat nilai-nilai karakter di dalamnya. Dengan hadirnya kebijakan Perda Pendidikan Karakter penulis ingin mengetahui apakah posisi PPKn sebagai pendidikan karakter semakin menguat atau justru semakin melemah, karena sampai saat ini PPKn masih dianggap mata pelajaran yang kurang penting. Padahal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran dan posisi yang penting dalam membangun karakter bangsa, sehingga Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki tanggung jawab yang besar dalam mencapai tujuan nasional khususnya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pada dasarnya peran untuk membangun karakter bangsa tidak hanya tugas pendidikan kewarganegaraan saja, namun juga tugas mata pelajaran atau mata kuliah yang lain, tetapi pendidikan kewarganegaraan memiliki beban moral yang paling besar karena pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan moral bangsa. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Cholisin (2011: 11) bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membangun warga negara yang baik mengembangkan tiga kompetensi yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dan karakter (*civic disposition*).

Dari hasil penelitian, ternyata hadirnya Perda Pendidikan Karakter berpengaruh positif

dalam pembelajaran PPKn, walaupun pengaruhnya tidak terlalu besar. Perda Pendidikan Karakter sendiri tidak hanya fokus pada pembelajaran di dalam kelas, namun juga pengembangan nilai-nilai melalui budaya sekolah mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh warga sekolah. Perda Pendidikan Karakter ini memuat prioritas pengembangan nilai karakter di daerah yaitu religius dan semangat kebangsaan. Pengembangan nilai karakter religius dilaksanakan melalui Pendidikan Agama sedangkan pengembangan nilai karakter semangat kebangsaan melalui Pendidikan Berbasis Muatan Lokal (Kemartaraman) sesuai nilai-nilai Pancasila. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novendra Hidayat (2016:45) tentang otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan yang dilakukan pada jenjang pendidikan menengah Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, Pemerintah Daerah diharapkan menciptakan strategi dan inovasi dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan di daerahnya masing-masing.

Pemerintah Daerah Kulon Progo dengan adanya desentralisasi pendidikan telah berinovasi membuat Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kulon Progo yang mengedepankan karakter dan nilai-nilai budaya lokal. Seperti pendapat yang dikemukakan Hamzah (2008:35) bahwa dalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah sebagai pemilik otoritas tertinggi di daerah memiliki kewenangan dalam hal pengaturan, pengurusan, pembinaan, serta pengawasan. Karenanya komitmen dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan adalah suatu hal yang sangat diperlukan. Pemerintah Daerah mengetahui dan mengerti apa yang seharusnya dapat dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya. Peraturan Daerah Kulon Progo tentang Pendidikan Karakter telah menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kulon Progo turut aktif meningkatkan kualitas

pendidikan termasuk di dalamnya adalah meningkatkan pelaksanaan pendidikan karakter di daerah. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sardiman (2013:5) mengemukakan bahwa pemerintah harus secara intens melibatkan diri dalam pendidikan karakter ini dengan berbagai regulasi, menetapkan berbagai peraturan daerah yang dapat mendukung pelaksanaan pembentukan karakter bangsa.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, diketahui bahwa penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter yang dilakukan oleh guru mata pelajaran PPKn SMP se- Kabupaten Kulon Progo berada dalam kategori tinggi. Dari 40 guru PPKn SMP se- Kabupaten Kulon Progo yang menjadi responden penelitian ada 39 orang (97,5%) guru yang masuk dalam kategori tinggi dalam melaksanakan Perda Pendidikan Karakter. Sementara itu, hanya 1 orang (2,5%) yang termasuk dalam kategori sedang, dan tidak ada guru yang termasuk dalam kategori rendah. Dari hasil deskripsi analisis data secara keseluruhan, guru yang berkategori tinggi menerapkan Perda Pendidikan Karakter dengan baik, ini dilihat dari skor rata-rata yang dimiliki oleh guru berkategori tinggi dalam menerapkan Perda Pendidikan Karakter yang hampir semua item pertanyaan berskor rata-rata lebih dari 3. Namun, ada beberapa indikator penerapan Perda Pendidikan Karakter yang kurang optimal dilakukan oleh guru berkategori tinggi, yaitu jarang mengidentifikasi nilai-nilai karakter dalam Perda Pendidikan Karakter untuk kemudian diterapkan dalam pembelajaran PPKn. Selain itu guru juga mengalami kendala ketika melaksanakan ketentuan Perda Pendidikan Karakter. Sementara itu, guru yang berkategori sedang dalam menerapkan Perda Pendidikan Karakter jarang menerapkan isi Perda secara konsisten, dan jarang mengembangkan nilai-nilai karakter dalam Perda.

Berdasarkan hasil analisis data pada variabel terikat, diketahui bahwa upaya

pembentukan karakter dalam pembelajaran PPKn SMP yang dilakukan oleh guru PPKn SMP se-Kabupaten Kulon Progo seluruhnya berada dalam kategori tinggi, tidak ada guru yang masuk dalam kategori sedang maupun kategori rendah. Namun, ada beberapa indikator upaya pembentukan karakter dalam pembelajaran PPKn yang kurang optimal dilakukan oleh guru yaitu jarang menggunakan metode pembelajaran yang menarik agar nilai-nilai karakter dapat dipahami oleh peserta didik. Selain itu guru juga jarang melakukan evaluasi pembelajaran PPKn yang mengintegrasikan nilai-nilai karakter di dalamnya. Peran guru PPKn dalam membentuk karakter peserta didik sangat penting. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hardiyana (2014:63) bahwa pengaruh guru PPKn SMK se Kabupaten Pati terhadap pembentukan karakter siswa berada pada kriteria sangat tinggi, hal ini didukung oleh skor sebesar 70,80% dalam arti penanaman karakter pada anak bisa dimiliki dengan sangat baik salah satunya berkat proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru PPKn. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan karakter dalam pembelajaran di kelas dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran.

Kemampuan yang harus dimiliki guru PPKn agar dapat mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran dengan baik menurut Juliardi (2015: 136) adalah yang pertama, guru atau pendidik mampu menyusun rencana pembelajaran dengan menautkan perilaku aspek nilai karakter pada indikator dan tujuan pembelajaran serta bahan belajar PPKn, dalam proses pembelajaran PPKn. Kedua, pendidik harus mampu menciptakan watak atau karakter kepada setiap peserta didik. Ketiga, guru melakukan evaluasi pembelajaran PPKn yang menerapkan nilai-nilai karakter dilakukan pada pembentukan karakter. Dengan melihat hasil tugas mingguan yang berupa tugas peningkatan karakter/sikap yang dibuat oleh peserta didik, terlihat perubahan dan peningkatan pada diri

mereka secara bertahap setiap minggunya.

Dalam pengembangan karakter peserta didik di sekolah, guru memiliki posisi yang strategis sebagai pelaku utama. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Arianto (2013:4) bahwa guru merupakan sosok yang bisa ditiru atau menjadi idola bagi peserta didik. Guru bisa menjadi sumber inspirasi dan motivasi peserta didiknya. Sikap dan perilaku seorang guru sangat membekas dalam diri peserta didik, sehingga ucapan, karakter dan kepribadian guru menjadi cermin peserta didik. Penerapan Perda Pendidikan Karakter di Kulon Progo juga tidak bisa lepas dari peran guru PPKn sebagai pengampu mata pelajaran yang mengintegrasikan pendidikan karakter di dalamnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut.

1. Terdapat hubungan yang positif antara penerapan Perda Pendidikan Karakter Kabupaten Kulon Progo dengan upaya pembentukan karakter dalam pembelajaran PPKn SMP sebesar 0,501. Hal tersebut dibuktikan dengan harga koefisien korelasi (r) sebesar 0,501 yaitu $r_{hitung} > r_{tabel}$ ($0,501 > 0,312$). Artinya hubungan penerapan Perda Pendidikan Karakter dengan upaya pembentukan karakter dalam pembelajaran PPKn SMP sebesar 0,501 dalam kategori sedang, dengan arah hubungan yang positif.
2. Penerapan Perda Pendidikan Karakter berpengaruh terhadap upaya pembentukan karakter dalam pembelajaran PPKn SMP sebesar 25,1%. Hal ini diketahui dari nilai koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,251. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel pembentukan karakter dalam pembelajaran PPKn SMP dipengaruhi oleh penerapan Perda Pendidikan Karakter sebesar 25,1%

sedangkan sebanyak 74,9% dipengaruhi oleh variabel lain. Dari hasil analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian yang berbunyi “penerapan Peraturan Daerah Kulon Progo tentang Pendidikan Karakter berpengaruh terhadap upaya pembentukan karakter dalam pembelajaran PPKn SMP” diterima.

Saran

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara penerapan Perda Pendidikan Karakter dengan upaya pembentukan karakter dalam pembelajaran PPKn SMP. Dengan hadirnya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter tidak membuat posisi mata pelajaran PPKn sebagai mata pelajaran yang menekankan pendidikan karakter melemah, justru memberikan pengaruh positif walapun pengaruhnya tidak terlalu besar. Perda Pendidikan Karakter turut membantu menciptakan pendidikan karakter yang efektif, sistematis, dan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan nilai-nilai budaya lokal dalam pembelajaran di kelas.
2. Hendaknya guru-guru, tidak hanya guru mata pelajaran PPKn selalu berusaha untuk mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran di kelas, dan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo hendaknya selalu melakukan evaluasi pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dengan mengacu pada ketentuan dalam Perda Pendidikan Karakter tersebut. Apabila dalam pelaksanaan Perda tersebut di sekolah ternyata ditemui kendala, dapat dicari solusi terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

Arianto,S, dkk. (2013). Peran guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam upaya pembentukan karakter peserta didik. *Jurnal PPKn UNJ*, 1(2); 4-5.

Cholisin. (2011). *Peran guru PKN dalam pendidikan karakter*. Disampaikan pada

Kuliah Umum Jurusan PPKn FKIP UAD Yogyakarta.

- Depdikbud. (2003). *Undang-Undang RI Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Dianti, P. (2014). Integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan karakter siswa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 23(1), 68-70.
- Hamzah B. Uno. (2008). *Profesi kependidikan: problema, solusi, dan reformasi pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hardiyana, S. (2014). Pengaruh guru PKN terhadap pembentukan karakter siswa. *Jurnal Ilmiah PPKn IKIP VETERAN SEMARANG*, 2(1), 63-64.
- Hidayat, Novendra. (2016). Otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan (studi pada jenjang pendidikan menengah Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto). *Jurnal Society*, VI(I), 41-49.
- Juliardi,B. (2015). Implementasi pendidikan karakter melalui pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 2(2), 120-135.
- Kemendagri. (2015). *Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo, Nomor 18 Tahun 2015, tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter*.
- Kemsekneg. (2017). *Peraturan Presiden, Nomor 87 Tahun 2017, tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)*.
- Sardiman. (2013). Pendidikan karakter dan peran pemerintah. *Jurnal Pendidikan* 3(4), 5-6.
- Samsuri. (2011). Kebijakan pendidikan kewarganegaraan era reformasi di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*. 2, 278.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Winarno. (2018). Materi pembelajaran PPKn berbasis nilai lokal (identifikasi dan implementasi). *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2). 11-14.

